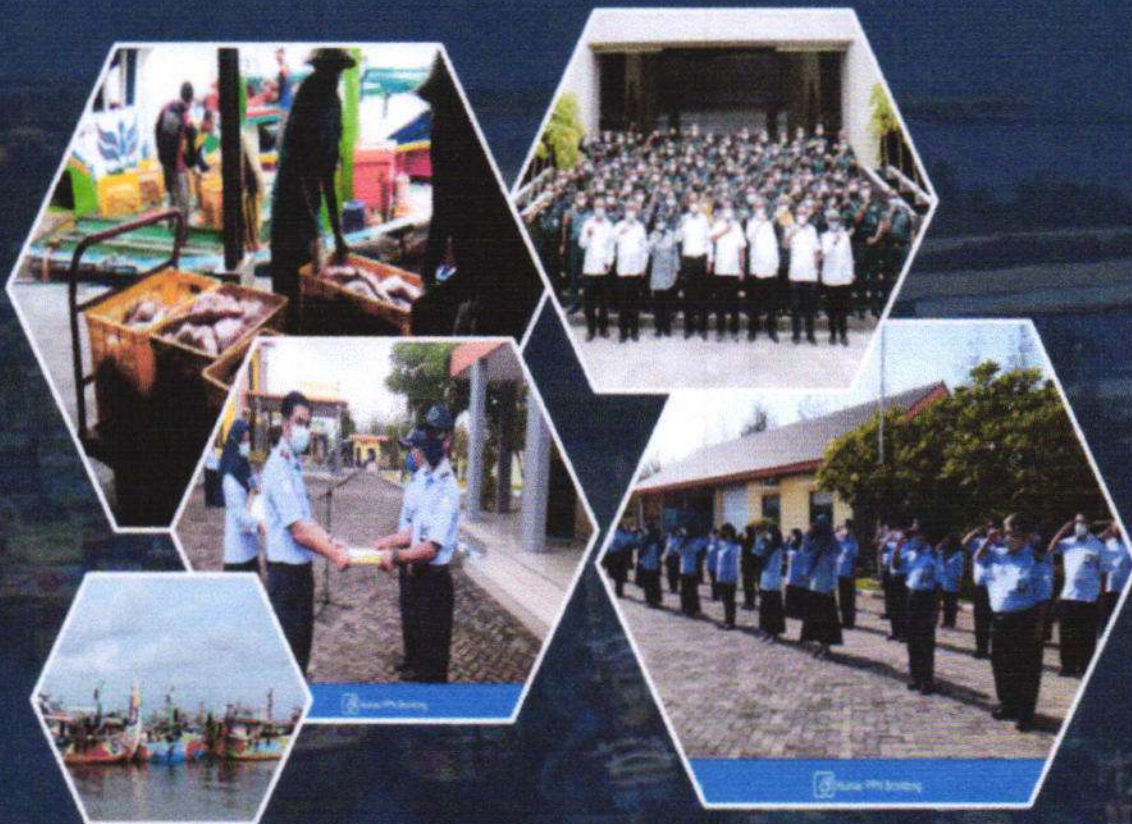




PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG

# LAPORAN KINERJA



---

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
2021**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>III</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	2
1.3. Personil PPN Brondong.....	4
1.4. Struktur Organisasi.....	5
1.5. Sistematika Penyajian.....	6
<b>BAB II PENDAHULUAN .....</b>	<b>7</b>
2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap .....	7
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Perikanan Tangkap.....	8
2.3. Rencana Kinerja PPN Brondong Tahun 2021 .....	14
2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja.....	16
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>18</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
4.1. Kesimpulan .....	41



## KATA PENGANTAR

Segala puji Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmatNYA sehingga bisa terselesaikannya Laporan Kinerja UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2021. Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terhadap pelaksanaan APBN tahun 2021. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan gambaran tentang pencapaian dari target indikator kinerja utama UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Selain itu juga sebagai pertanggungjawaban terhadap stakeholder yang ada di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan, sehingga diperlukan saran penyempurnaan dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak khususnya bagi pengembangan perikanan berbasis kinerja dimasa mendatang.

Lamongan, 13 Januari 2022

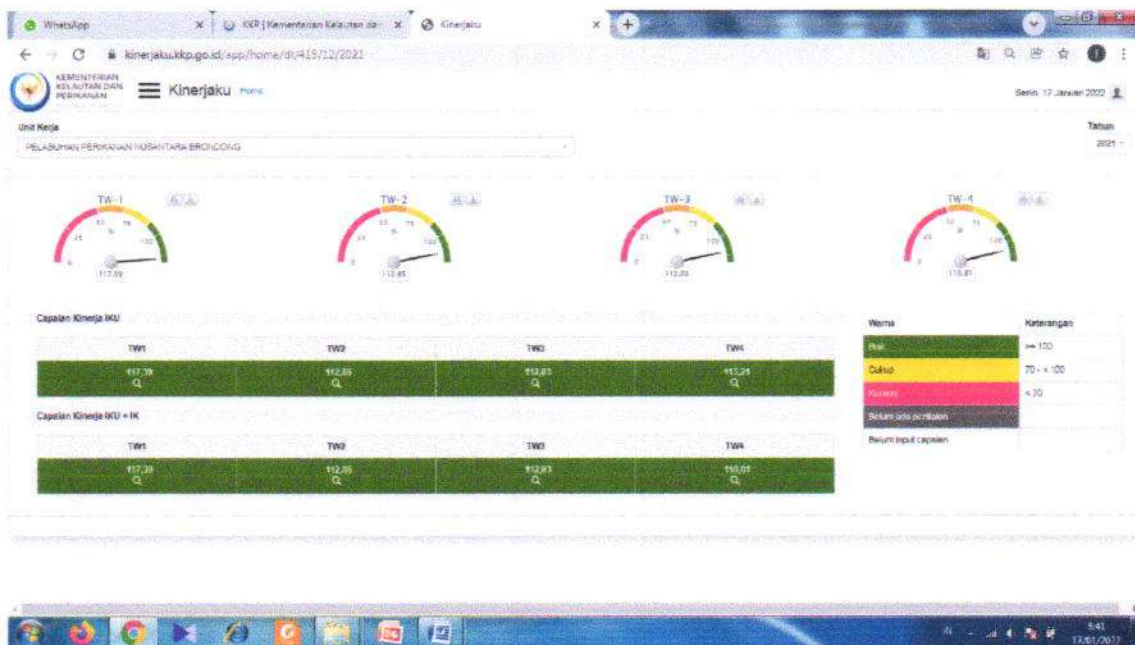






## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2021 merupakan laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berbasis *balance scorecard* (BSC) terhadap rencana kinerja (*performance plan*) Tahun 2021. Sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu secara periodik melalui serangkaian program dan kegiatan tahunan dengan mempertimbangkan kebijakan dan program Ditjen Perikanan Tangkap serta memperhatikan program unit eselon I lainnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu dengan mempertimbangkan peluang, potensi, permasalahan dan kewenangan yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.



Secara umum dapat tercapai dengan rata-rata tingkat capaian sasaran program Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 110,81 %. Capaian indikator kinerja utama tahun 2021 adalah sebagai berikut :





Tabel 1. Capaian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Metode *Balanced Scorecard* (BSC) Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN	% CAPAIAN
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1 Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang)	60	63	105
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	2 Nilai PNBPN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	770	1.805,66	234,50
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap ber tanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	3 Jumlah rekomendasi pengelolaan SDI di WPP 712 (dokumen)	1	1	100
		4 Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (laporan)	80	150	187,50
4	Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	5 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton)	47.460	54.881,31	115,64
5	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	6 Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	1	1	100
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing dan berkelanjutan	7 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	81	85,71	105,81
7	Pengelolaan awak kapal perikanan yang bedaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8 Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	30	55	183,33
8	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	9 Persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong (persen)	75	84,50	112,67
9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10 IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	73	81,84	112,11
		11 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	75,07	69,75	92,91



		12	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	85,15	87,40	102,64
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	72,5	79,55	109,72
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	72,5	90	124,14
		15	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	86	83,72	97,35
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	89	96,71	108,66

**Program: 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan : Rp. 2.247.960.000,-**

**2. Dukungan Manajemen : Rp. 11.074.961.000,-**

**Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 13.322.921.000,-**





## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan.
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan.
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI).
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara *akuntable* sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dicapai, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan - permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan



kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang disusun setiap tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2021 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2021 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

## 1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, Tugas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;





8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, struktur Organisasi Perikanan Nusantara Brondong terdiri atas 4 (Empat) unit kerja Eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Seksi Operasional Pelabuhan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis dan penerbitan CPIB.
2. Seksi Kesyahbandaran, dipimpin oleh Kepala Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Seksi Tata Kelola dan pelayanan Usaha, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana, bimbingan teknis, fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan, publikasi



hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi, pelayanan pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha, pelayanan jasa dan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

4. Subbagian Tata Usaha, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.3. Personil PPN Brondong

Dalam menjalankan tugasnya, Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (PPN Brondong) di dukung oleh 67 orang pegawai. Komposisi pegawai di PPN Brondong pada tahun 2021 berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Komposisi Pegawai Di PPN Brondong Pada Tahun 2021 Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.**

Status	Golongan/Jenis Kelamin								Jumlah
	I		II		III		IV		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L
PNS	-	-	10	-	26	12	1	-	49
CPNS	-	-	-	1	-	1	-	-	2
TKK									16
Jumlah	-	-	10	1	26	13	1	-	67



#### 1.4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/PERMEN-KP/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelabuhan Perikanan
- b. Sub Bagian Umum
- c. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing bagian mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut di atas.



Gambar 1. Stuktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara



## 1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong selama Tahun 2021. Capaian Kinerja (Performance Results) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (Performance Plan) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- 2) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
- 3) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
- 4) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan (PK).
- 5) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi pada tahun 2021, Capaian anggaran.
- 6) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
- 7) **Lampiran**.

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap





## BAB II. PENDAHULUAN

### 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan Daya Saing SDM KP
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Adapun Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan



#### Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

#### Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

#### Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

### **2.2. Tujuan dan Sasaran Strategus Pembangunan Perikanan Tangkap**

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang ingin dicapai Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni:
  - a. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat
  - b. Inovasi dan Riset KP menguat
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
  - a. Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal
  - b. Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
  - c. Pengawasan pengelolaan SDKP.
  - d. Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
  - e. Pengelolaan ruang laut optimal.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yaitu Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, yaitu Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.





Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan / fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/ perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
2. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
3. Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.
4. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh DJPT sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran program DJPT 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan nelayan meningkat, dengan indikator kinerja:
  - a. Nilai Tukar Nelayan (NTN);
  - b. Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp.Juta/nelayan/bulan).



2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
  - a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen), dengan indikator output :
    - Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit);
    - Jumlah hari layar pemantauan oleh observer di atas kapal perikanan (hari layar);
    - Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPP).
3. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan, dengan indikator kinerja:
  - a. Nilai PNBPN Ditjen Perikanan Tangkap (Rp.Miliar), dengan indikator output:
    - Nilai PNBPN SDA Ditjen Perikanan tangkap (Rp.Miliar);
    - Nilai PNBPN Pelabuhan Perikanan/BBPI (Rp.Miliar)
4. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat dan WPPNRI (persen), dengan indikator output:
    - Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP);
    - Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen);
    - Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP);
    - Jumlah sumber daya ikan perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (lokasi).
5. Produksi perikanan tangkap meningkat, dengan indikator kinerja:
  - a. Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton);
  - b. Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Triliun);
  - c. Persentase dukungan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap (persen), dengan indikator output:
    - Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (lokasi);





- Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (persen);
- Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit);
- Jumlah kapal yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit);
- Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit);
- Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diterbitkan (unit);
- Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen);
- Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit);
- Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (unit);
- Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan (orang);
- Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang);
- Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (unit);
- Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya, jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan (provinsi);
- Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit);
- Jumlah Capaian kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI) (unit);
- Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi);
- Jumlah nelayan yang terlindungi (orang);
- Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan);
- Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (bidang);
- Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kelompok) (kumulatif);
- Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP);



- Jumlah fasilitasi kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata (lokasi);
  - Jumlah kampung nelayan maju yang tertata dan terintegrasi.
6. Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik, dengan indikator kinerja yaitu:
- a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai), dengan indikator kinerja pendukung:
    - Persentase pelaksanaan dukungan manajemen Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
    - Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level);
    - Indeks Efektivitas Kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks);
    - Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks);
    - Nilai SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
    - Nilai PMPRB UPT Pelabuhan Perikanan.
  - b. Unit berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker);
  - c. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
  - d. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup DJPT (persen);
  - e. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
  - f. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan Capaian anggaran DJPT TA.2019 (persen).

Sasaran program dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yakni stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

#### 1. Customer Perspective (Output)

Sasaran Program Pertama yakni “Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja : Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (60 orang).





Sasaran Program Kedua yakni “Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja : Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. 770 Juta).

Sasaran Program Ketiga yakni “Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja : Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (80 unit).

## 2. Internal Process Perspective (process)

Sasaran Program Ketiga yakni “Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja : Jumlah rekomendasi pengelolaan SDI di WPP 712 (1 dokumen).

Sasaran Program Keempat yakni “Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (47.460 ton).

Sasaran Program Kelima yakni “Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja : Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (1 unit).

Sasaran Program Keenam yakni “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing dan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja : Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (81 nilai).

Sasaran Program Ketujuh yakni “Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja : Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (30 orang).

Sasaran Program Kedelapan yakni “Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong”, dengan indikator kinerja : Persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong ( 75 persen)



### 3. Learning and Growth Perspective (input)

Sasaran Program kesembilan yakni "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong", dengan indikator kinerja :

- a. IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (75 nilai);
- b. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (75,07 nilai);
- c. Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (85,15 nilai);
- d. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (72,5 persen);
- e. Tingkat Kepatuhan Pengeluaran BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (72,5 persen);
- f. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong(86 nilai);
- g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (89 nilai).

#### 2.3. Rencana Kinerja PPN Brondong Tahun 2021

Untuk mengukur Capaian dan rencana strategis, PPN Brondong telah menetapkan target-target beserta anggaran di tahun 2021 untuk masing- masing Indikator Kinerja yang harus dicapai. Target - target ini dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan 2021. Hal ini ditetapkan pada setiap kegiatan baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan.

Pada tahun 2021, PPN Brondong melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp **13.322.921.000,-**.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan PPN Brondong dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran program yang telah ditentukan. Dalam rangka mengukur Capaian dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2021 yang mengacu pada *Balanced Score Card* (BSC). Adapun rencana kinerja tahunan 2021 dalam penganggaran dapat disajikan pada tabel 3 berikut ini:





Tabel 3. Sasaran program (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 sesuai dengan *Balanced Score Card* (BSC) pada Rencana Kinerja PPN Brondong Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang)	60
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	2	Nilai PNBPN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	770
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap ber tanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	3	Jumlah rekomendasi pengelolaan SDI di WPP 712 (dokumen)	1
		4	Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (laporan)	80
4	Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton)	47.460
5	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	6	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing dan berkelanjutan	7	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	81
7	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8	Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	30
8	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	9	Persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong (persen)	75
9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	73
		11	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	75,07
		12	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	85,15
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	72,5
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	72,5
		15	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	86
16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	89		





#### **2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja**

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya.

#### **2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja telah mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2019, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/KEPMEN-KP/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2019, serta Renstra Pelabuhan





Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020-2024. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Adapun Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang)	60
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	2	Nilai PNPB Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	770
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap ber tanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	3	Jumlah rekomendasi pengelolaan SDI di WPP 712 (dokumen)	1
		4	Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (laporan)	80
4	Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton)	47.460
5	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	6	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing dan berkelanjutan	7	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	81
7	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8	Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	30
8	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	9	Persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong (persen)	75
9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	73
		11	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	75,07
		12	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	85,15
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	72,5
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	72,5
		15	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	86
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	89

Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap  
 Jumlah Anggaran tahun 2021 : Rp 13.322.921.000,-





### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja PPN Brondong merupakan kinerja kolektif dari seluruh eselon 4 yang ada di PPN Brondong. Pengukuran kinerja pelabuhan terbagi dalam 3 Perspektif, 9 Sasaran Program dan 16 Indikator Kinerja Utama. Tiga perspektif tersebut meliputi :

1. Perspektif customer terdiri dari 3 sasaran program dan 3 indikator kinerja utama.
2. Perspektif internal proses terdiri dari 6 sasaran program dan 6 indikator kinerja utama.
3. Perspektif learning and growth terdiri dari 1 sasaran program dan 7 indikator kinerja utama.

Nilai Pencapaian Sasaran program (NPSS) kinerja PPN Brondong pada tahun 2021 sebesar 110,81%.

Tabel 5. Capaian Sasaran program Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2021

SASARAN PROGRAM		NILAI SASARAN PROGRAM (%)
1.	Permodalan dan Usaha Nelayan yang Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	105
2.	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	234,50
3.	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	143,75
4.	Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	115,64
5.	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	100
6.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing dan berkelanjutan	105,81
7.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	183,33
8.	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	112,67
9.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	106,79





Tabel 6. Capaian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Metode Balanced Scorecard (BSC) Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN	% CAPAIAN
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1 Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang)	60	63	105
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	2 Nilai PNBPN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	770	1.805,66	234,50
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap ber tanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	3 Jumlah rekomendasi pengelolaan SDI di WPP 712 (dokumen)	1	1	100
		4 Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (laporan)	80	150	187,50
4	Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	5 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton)	47.460	54.881,31	115,64
5	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	6 Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	1	1	100
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing dan berkelanjutan	7 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	81	85,71	105,81
7	Pengelolaan awak kapal perikanan yang bedaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8 Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	30	55	183,33
8	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	9 Persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong (persen)	75	84,50	112,67
9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10 IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	73	81,84	112,11
		11 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	75,07	69,75	92,91



	12	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	85,15	87,40	102,64
	13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	72,5	79,55	109,72
	14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	72,5	90	124,14
	15	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	86	83,72	97,35
	16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	89	96,71	108,66

### 3.1.1. Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui 1 (satu) yakni Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang).

#### IKU 1. Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap (Orang)

Indikator tingkat jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan kegiatan untuk penyediaan pojok pendanaan untuk stakeholder yang akan melaksanakan konsultasi terkait kredit perikanan di pojok pendanaan tersebut. Hasil capaian dari Indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah Nelayan yang terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Harapannya dengan adanya kegiatan ini Pendapatan Nelayan Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.





Tabel 7. Target dan Capaian IKU Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nelayan)	60	100	60	63	105

Berdasarkan Tabel diatas, indikator Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tercapai sebanyak 63 nelayan melebihi target yang ada. Pada tahun 2020, capaian indikator ini sebesar 60 orang. Indikator ini tercapai dengan terlaksananya kegiatan fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan). Adapun anggaran yang mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,- dengan melibatkan tenaga sebanyak 1 orang.

### **3.1.2. Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui 1 (satu) yakni Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta).

#### **IKU 2. Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)**

Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor perikanan tangkap adalah PNBP yang dikelola oleh UPT PPN Brondong berupa PNBP yang berasal dari pungutan atas tarif pelayanan jasa yang ada di UPT PPN Brondong sesuai dengan PP 75 Tahun 2015. Sasaran dari program ini adalah Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Menurut Undang-undang U No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Undang-undang tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Tabel 8. Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di UPT PPN Brondong Tahun 2021

No	Bulan	Capaian (Rp)
1	Januari	137.757.903
2	Februari	128.466.837
3	Maret	92.708.974
4	April	73.083.145
5	Mei	66.989.713
6	Juni	73.130.759
7	Juli	133.786.589
8	Agustus	147.277.150
9	September	178.364.667
10	Oktober	184.176.669
11	November	251.641.317
12	Desember	338.273.973
JUMLAH		1.805.657.696

Capaian indikator nilai PNBP pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.805,66 juta atau sebesar 234,50% dari target sebesar Rp. 770 juta.

Tabel 9. Target dan Capaian IKU Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di UPT PPN Brondong Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020

No. IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
2	Nilai PNBP di UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)	1.039,19	148,46	770	1.805,66	234,50





Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai PNBP hingga tahun 2021 yaitu sebanyak Rp. 1.805,66 juta atau sebesar 234,5% lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada 2021 yaitu sebesar 770 Juta. Nilai PNBP tersebut juga lebih tinggi dibanding nilai PNBP pada tahun 2020 yaitu sebanyak Rp. 1.039,19 juta sebesar 148,46%. Tingginya Capaian nilai PNBP ini dipengaruhi oleh tingginya aktivitas pengguna jasa di PPDI serta upaya peningkatan PNBP yang terus menerus dilakukan oleh seluruh pegawai PPN Brondong baik itu inovasi maupun peningkatan fasilitas pelabuhan demi meningkatkan nilai PNBP. Indikator ini didukung dengan kegiatan pelayan jasa tambat labuh, jasa pas masuk, jasa kebersihan, jasa listrik, jasa bengkel, sewa balai pertemuan, jasa air, jasa cold storage, dan jasa sewa jenis-jenis alat berat dan pendapatan jasa lainnya. Indikator ini didukung anggaran sebesar Rp. 157.531.000,- dengan jumlah pegawai sebanyak 28 orang dari Subkoordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

### **3.1.3. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap ber tanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.**

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui 2 (dua) yakni Jumlah rekomendasi pengelolaan SDI di WPP 712 (dokumen) dan Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (laporan).

#### **IKU 3. Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 712 (dokumen).**

Indikator jumlah rekomendasi pengelolaan SDI di WPP 712 merupakan indikator operasionalisasi lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di WPP 712. Sasaran dari tata Kelola sumberdaya perikanan tangkap bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang dihitung berdasarkan Laporan kegiatan operasionalisasi lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di WPP 712.

Tabel 10. Target dan Capaian IKU Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumberdaya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
4	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 712 (dokumen)	-	-	100	100	100

Berdasarkan Tabel diatas, indikator Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumberdaya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan tercapai sebanyak 100 % sesuai dengan target yang ada. Pada tahun 2020, indikator ini tidak ada sebagai capaian PPN Brondong. Indikator ini tercapai dengan terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam rangka evaluasi rencana pengelolaan perikanan 712. Adapun anggaran yang mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 19.800.000,- dengan melibatkan tenaga sebanyak 2 orang.

**IKU 4. Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (laporan)**

Indikator Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (laporan) dilihat berdasarkan Kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan yang berpangkalan di PPN Brondong. Sasaran indikator ini adalah Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dimana perhitungannya dilakukan berdasarkan Jumlah kapal perikanan yang melakukan penyampaian dokumen logbook penangkapan ikan setelah melakukan aktivitas penangkapan ikan dan telah diverifikasi oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan serta terdaftar dalam aplikasi SILOPI.



Tabel 11. Target dan Capaian IKU Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (laporan) pada Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020

No. IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
4	Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	209	261,25	80	150	187,50

Berdasarkan Tabel diatas, indikator Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tercapai sebanyak 150 laporan atau 187,50 % dari target yang ada, yaitu 80 laporan. Pada tahun 2020, indikator ini tercapai sebesar 209 laporan atau 261,25% dari target 80 laporan. Indikator ini tercapai dengan terlaksananya kegiatan pengumpulan data logbook penangkapan ikan dan sosialisasi penerapan e-logbook penangkapan ikan di pelabuhan perikanan. Adapun anggaran yang mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 27.235.000,- dengan melibatkan tenaga sebanyak 12 orang.

#### **3.1.4. Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui 1 (satu) yakni Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton).

#### **IKU 5. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton)**

Indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton) merupakan Jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratakan di PPN Brondong dan telah divalidasi dengan sasaran Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan dihitung Penjumlahan produksi perikanan tangkap yang didaratakan di PPN

Brondong yang sudah divalidasi.

Tabel 12. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap PPN Brondong Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Produksi (kg)
1	Januari	3.960.223
2	Februari	2.792.309
3	Maret	5.047.709
4	April	4.898.981
5	Mei	2.469.989
6	Juni	5.178.847
7	Juli	3.688.493
8	Agustus	4.814.254
9	September	5.532.315
10	Oktober	5.718.116
11	November	5.636.180
12	Desember	5.143.894
		<b>54.881.309</b>

Capaian indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap UPT PPN Brondong Tahun 2021 sebesar 54.881,31 ton atau sebesar 115,64% dari target sebesar 47.460 ton.

Tabel 13. Target dan Capaian IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap UPT PPN Brondong Tahun 2021 dibandingkan Capaian 2021

Satuan : ton

No. IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap UPT PPN Brondong	55.358,89	116,66	47.460	54.881,31	115,64

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah produksi ikan hingga tahun 2021 adalah sebanyak 54.881,31 ton ikan atau sebanyak 115,64% dari target yang ditetapkan yaitu 47.460 ton ikan. Jumlah produksi perikanan tangkap hingga tahun 2021 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 55.358,89 ton. Penurunan ini disebabkan karena cuaca buruk dan musim baratan yang terjadi hampir sepanjang bulan januari hingga



Februari yang mempengaruhi intensitas nelayan melaut. Tindakan yang dilakukan demi mendukung pencapaian target IKU jumlah produksi perikanan tangkap yaitu dengan melakukan pendataan jumlah produksi dari kapal yang bongkar serta pengelolaan dan operasional pusat informasi pelabuhan perikanan. Kegiatan ini didukung oleh 3 pegawai enumerator dan 6 pengolah data dengan anggaran sebesar Rp. 16.400.000,-.

### 3.1.5. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui 1 (satu) yakni Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit).

#### **IKU 6. Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)**

Indikator Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit) merupakan kegiatan Kegiatan pengembangan fasilitas yang dilaksanakan di PPN Brondong dengan sasaran Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Adapun capaian indikator ini dihitung berdasarkan laporan pengembangan fasilitas di PPN Brondong.

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020

Satuan : ton

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
7	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	1	1	1	1	100



Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 PPN Brondong melakukan pembangunan / rehabilitasi prasarana dan peningkatan sarana PPN Brondong :

- a. Anggaran pembangunan / *rehabilitasi prasarana* PPN Brondong sebesar Rp. 1.127.683.000,-.
- b. Anggaran peningkatan sarana PPN Brondong sebesar Rp. 80.880.000,-.

Total anggaran pengembangan fasilitas di PPN Brondong yang terealisasi di tahun 2021 adalah Rp. 1.208.563.000,-, yang saat ini sudah menyumbang manfaat bagi PPN Brondong dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

### **3.1.6. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing dan berkelanjutan**

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui 1 (satu) yakni Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen).

#### **IKU 7. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)**

Indikator Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) merupakan Capaian tingkat operasional PPN Brondong yang berupa penyediaan data operasional pelabuhan, pelayanan kesyahbandaran, pelayanan usaha pelabuhan perikanan, pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dan pemenuhan dokumen operasional pelabuhan yang digabung serta dihitung menjadi Nilai Evkin (Evaluasi Kinerja) dan dapat diakses melalui website PIPP. Sasaran dari indikator ini adalah Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan dihitung berdasarkan Nilai tingkat operasional PPN Brondong diperoleh dari aplikasi PIPP.

Tingkat Operasional di UPT PPN Brondong yang memenuhi standar adalah ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja operasional dan terlaksananya kegiatan-kegiatan operasional UPT PPN Brondong. Kegiatan tersebut meliputi : Laporan PIPP.





Capaian indikator Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2021 sebesar 83,92 atau sebesar 103,60% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 81.

Tabel 15. Data Nilai Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) Tahun 2021

No	Bulan	Nilai PIPP
1	Januari	86,75
2	Februari	92,00
3	Maret	87,50
4	April	82,25
5	Mei	80,50
6	Juni	74,50
7	Juli	86,25
8	Agustus	88,50
9	September	90,75
10	Oktober	87,00
11	November	91,75
12	Desember	80,75
<b>Rata-Rata</b>		<b>85,71</b>

Tabel 16. Target dan Capaian IKU Tingkat Operasional di UPT Yang Memenuhi Standar Tahun 2021 dibandingkan tahun 2020

No. IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
7	Tingkat operasional pelabuhan perikanan di UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	85,35	106,69	81	85,71	105,81

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai PIPP hingga tahun 2021 adalah sebesar 85,71 dengan capaian 105,81% dari target yang telah ditetapkan sebesar 81. Capaian indikator ini di 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Capaian di 2020, yaitu sebesar 85,35 dengan capaian 106,69%. Hal ini dicapai dengan koordinasi yang baik antar pegawai di PPN Bronong demi mendukung pencapaian target IKU tingkat operasional untuk mengatasi kendala yang ada pada periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu dengan menugaskan 9 orang pegawai untuk mencari dan mengentry data dukung operasional



pelabuhan pada aplikasi PIPP serta di lakukan supervise dan evaluasi oleh atasan langsung terkait. Mereka terdiri dari 5 orang pegawai di subkoordinator kelompok Operasional Pelabuhan, 1 orang pegawai di subkoordinator kelompok Kesyahbandaran, 1 orang pegawai di subkoordinator kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha serta 2 orang pegawai di subkoordinator kelompok Tata Usaha. Indikator ini didukung anggaran sebesar Rp. 358.774.000,-.

Mereka melakukan entry data sesuai dengan bagiannya masing-masing. Petugas di subkoordinator kelompok Operasional Pelabuhan mengentry data kapal dan alat tangkap, data produksi, data SL3 dan data Revit Tuna. Petugas di subkoordinator kelompok Kesyahbandaran mengentry data BBM dan data SHTI, petugas di subkoordinator kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mengentry data PNBP, data lahan dan investasi pelabuhan, data existing dan perkiraan biaya pembangunan, dan data nilai ekonomi. Adapun petugas di subkoordinator kelompok Tata Usaha mengentry data umum pelabuhan perikanan dan data instansi serta lembaga di pelabuhan. Kegiatan entry data dilakukan setiap hari. Data yang dikumpulkan oleh enumerator hari ini akan direkap dan diolah. Data tersebut kemudian di masukan dalam aplikasi PIPP keesokan harinya.

### **3.1.7. Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui 1 (satu) yakni Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang).

#### **IKU 8. Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan / kompetensinya (orang)**

Indikator Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang) merupakan Capaian Jumlah nelayan / awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan / kompetensinya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, sasarannya adalah untuk mewujudkan Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan





Nusantara Brondong. Adapun cara perhitungan indikator ini adalah dengan menghitung Capaian Jumlah nelayan / awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan / kompetensinya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong selama 12 bulan.

**Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Jumlah awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan / kompetensinya (orang) Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020**

Satuan : ton

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
8	Jumlah awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan / kompetensinya (orang)	20	100	30	55	183,33

Berdasarkan tabel diatas, jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi dan keterampilan adalah sebanyak 55 awak kapal. Pada tahun 2020 telah diterbitkan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) untuk awak kapal di Wilayah Kerja PPN Brondong sebanyak 55 sertifikat, dengan capaian 183,33% dari target yang ditetapkan sebanyak 30 awak kapal. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.500.000,-. Jumlah capain ini lebih besar dibandingkan tahun 2020 yang hanya tercapai 20 awak atau sebesar 100%. Dengan adanya awak kapal yang tersertifikasi ini harapannya dapat meningkatkan nilai tawar nelayan dan meningkatkan ekspor hasil perikanan dari wilayah PPN Brondong.

### **3.1.8. Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui 1 (satu) yakni Persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong (persen).

**IKU 9. Persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong (persen)**

Indikator Persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong (persen) merupakan Persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong. Sasaran dari indikator ini adalah terwujudnya Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Adapun cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung Jumlah persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong.

**Tabel 18. Persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong (persen) Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020**

Satuan : ton

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
9	Persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong (persen)	-	-	75	84,50	112,67

Berdasarkan tabel diatas, persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong (persen) adalah sebanyak 84,50%. Jumlah tersebut berasal dari 405 kapal berdokumen dibandingkan dengan jumlah total kapal secara keseluruhan yaitu 479 kapal. Pada tahun 2020 tidak ada indikator persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen). Indikator ini didukung anggaran sebesar Rp. 5.750.000,- dengan jumlah pegawai sebanyak 1 orang.





### 3.1.9. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui 7 (tujuh) yakni :

- 1) IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
- 2) Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
- 3) Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai);
- 4) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen);
- 5) Tingkat Kepatuhan Pengeluaran BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen);
- 6) Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
- 7) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

#### **IKU 10. IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Indikator IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks) merupakan indikator yang menjadi gambaran tingkat profesionalitas dari ASN pada suatu unit kerja diukur berdasarkan kualifikasi yang dimiliki. Penjelasan lebih detailnya yaitu profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesional ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No.38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Cara menghitung indikator ini adalah dengan rumus:

$$IP_{Lev.2} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Nantinya, berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :



- a. Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
- b. Nilai 81-90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
- c. Nilai 71-80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
- d. Nilai 61-70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
- e. Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Pengukuran dan pelaporan capaian indikator IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini dilaksanakan setiap semester. Pada semester I atau tahun 2021, nilai IP ASN PPN Brondong mempunyai nilai 81,84 atau sebesar 112,11 % dari jumlah target sebesar 73. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran pegawai mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi E-Milea. Indikator ini didukung anggaran sebesar Rp. 5.750.000,- dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang.

#### **IKU 11. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Indikator Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan Capaian Penilaian Mandiri Wilayah Bebas dari Korupsi (PMWBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan sasaran terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Indikator ini dihitung berdasarkan Nilai LKE WBK TIM Evaluator PPN Brondong.

**Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020**

Satuan : ton

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
11	Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	86,84	115,68	75,07	69,75	92,91



Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2021 adalah sebesar 69,75 atau sebesar 92,91% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75,07. Pada tahun 2020 indikator capaian ini tercapai sebesar 86,84 atau sebesar 115,68%. Tidak tercapainya indikator tersebut disebabkan karena dokumen-dokumen tidak terpenuhi dan tidak adaya dukungan dari semua pegawai yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan WBK. Ketidakberhasilan ini berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan peningkatan kinerja pegawai. Kegiatan pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 110.320.000,- dengan keterlibatan seluruh pegawai dalam rangka tercapainya indikator ini.

#### **IKU 12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)**

Indikator Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) merupakan Persentase pemenuhan dokumen AKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terhadap dokumen penilaian AKIP yang dipersyaratkan, antara lain : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Evaluasi Kinerja 4. Pelaporan Kinerja 5. Capaian Kinerja. Sasaran dari indikator ini adalah terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Perhitungan Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong didasarkan pada Nilai LKE SAKIP oleh TIM Evaluator dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

AKIP yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Nilai AKIP PPN Brondong adalah



ukuran perkembangan implementasi SAKIP di PPN Brondong. Nilai ini diperoleh dari hasil evaluasi terhadap 5 (lima) komponen SAKIP di PPN Brondong yang meliputi ; (i) Perencanaan kinerja, (ii) Pengukuran kinerja, (iii) Pelaporan kinerja, (iv) Evaluasi kinerja dan (v) Pencapaian sasaran kinerja organisasi.

**Tabel 20. Target dan Realisasi IKU Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Brondong Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020**

Satuan : ton

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Brondong	87,78	103,27	85,15	87,40	102,64

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian IKU Nilai PM SAKIP adalah 87,40 atau sebesar 102,64% dari target yang ditetapkan yaitu 85,15. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu 87,78 atau sebesar 103,27%. Tercapainya realisasi IKU Nilai PM SAKIP ini karena dokumen-dokumen terkait SAKIP sudah terpenuhi dan adaya dukungan dari semua pegawai yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan terkait SAKIP. Adapun jumlah anggaran yang mendukung indikator ini sebesar Rp. 9.617.000,-.

**IKU 13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)**

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) merupakan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, dimana sasaran dari indikator ini adalah terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Perhitungan indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.





**Tabel 21. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020**

No IKU	Indikator Kinerja	Satuan : ton				
		Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	-	-	72,5	79,55	109,72

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah 79,55 atau sebesar 109,72% dari target yang ditetapkan yaitu 72,5. Pada tahun 2020, indikaot ini tidak ada. Tercapainya realisasi IKU tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini karena dokumen-dokumen kepatuhan pengadaan barang/jasa satker pelabuhan perikanan nusantara brondong sudah terpenuhi dan adaya dukungan dari pejabat pengadaan barang dan jasa. Adapun jumlah anggaran yang mendukung indikator ini sebesar Rp. 91.000.000,-.

#### **IKU 14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)**

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) merupakan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan sasaran indikator terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.



**Tabel 22. Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020**

Satuan : ton

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	-	-	72,5	90	124,14

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian IKU tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah 90 atau sebesar 124,14% dari target yang ditetapkan yaitu 72,5. Pada tahun 2020, indikaot ini tidak ada. Tercapainya realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini karena dokumen-dokumen kepatuhan pengadaan barang/jasa satker pelabuhan perikanan nusantara brondong sudah terpenuhi dan adaya dukungan dari petugas pengelolaan BMN. Adapun jumlah anggaran yang mendukung indikator ini sebesar Rp. 63.770.000,-.

#### **IKU 15. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang sarasanya untuk meujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian Lembaga. Kemudian Permenkeu ini diturunkan dalam Perdirjen Anggaran Nomor 1/AG/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran tanggal 29 Juni 2018. Perdirjen ini menggantikan perdirjen sebelumnya nomor 2/AG/2017. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dimaksud difasilitasi melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan





Anggaran (IKPA). IKPA merupakan tolak ukur kinerja pelaksanaan anggaran yang memperhatikan beberapa komponen seperti Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran (Bobot Perhitungan 15%); Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (45%); Kepatuhan Terhadap Regulasi (30%), Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan (10%)

Adapun pengelompokkan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Kinerja Anggaran >90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
- b. Nilai Kinerja Anggaran >80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
- c. Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
- d. Nilai Kinerja Anggaran >50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang;

Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang;

Tujuan perdirjen Ini antara lain untuk :

- 1) Memberikan kesamaan persepsi dan penyeragaman evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL
- 2) Memberikan pedoman dalam melaksanakan analisis kinerja anggaran melalui kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-Kl dan
- 3) Menjadi rekomendasi atau masukan sebagai bahan pertimbangan pada penyusunan anggaran tahun berikutnya.

**Tabel 23. Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020**

Satuan : ton

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
15	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	-	-	86	83,72	97,35

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian IKU nilai kinerja anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah 83,72 atau sebesar 97,35% dari target yang ditetapkan yaitu 86. Pada tahun 2020, indikator ini tidak



ada. Tidak tercapainya realisasi IKU nilai kinerja anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini karena penarikan rencana penarikan dana kurang maksimal. Adapun jumlah anggaran yang mendukung indikator ini sebesar Rp. 17.080.000,-.

#### **IKU 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Indikator Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan Capaian nilai IKPA PPN Brondong yang di capai setiap semester. Indikator ini dihitung berdasarkan Hasil perhitungan Aplikasi OM SPAM dengan sasaran terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

**Tabel 24. Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020**

Satuan : ton

No IKU	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021
16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	99,38	112,93	89	96,71	106,79

Pengukuran dan pelaporan capaian indikator Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini dilaksanakan setiap semester. Pada semester II tahun 2021, nilai IKPA PPN Brondong adalah 96,71 atau sebesar 106,79 % dari jumlah target sebesar 89. Hal ini disebabkan adanya kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Semester II, adanya kepatuhan terhadap regulasi yang ada serta adanya efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun jumlah anggaran yang mendukung indikator ini sebesar Rp. 10.887.744.000,-.





## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran program (pencapaian outcome). Sasaran Program tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari 16 indikator yang sudah terukur adalah indikator yang berada di Customer Perspektif sebanyak 3 indikator, Internal Process Perspektif sebanyak 6 indikator dan di Learning and Growth Perspektif sebanyak 7 indikator. Dari 16 indikator yang sudah terukur tersebut terdapat 14 indikator sudah mencapai target 100 persen yakni sebagai berikut :

1. Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang) sebesar 63 dari target 60;
2. Nilai PNBPN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 2021 sebesar Rp. 1.805,66,- Juta dari target 770 juta;
3. Jumlah rekomendasi pengelanaan SDI di WPP 712 (dokumen) sebesar 1 dari target 1;
4. Jumlah laporan data logbook pengkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (laporan) sebanyak 150 kapal dari target 80;
5. Jumlah produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (ton) 2021 sebesar 54.881,31 ton dari target 80;
6. Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit) sebesar 1 dari target 1;
7. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) sebesar 85,71 dari target 81;
8. Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang) sebesar 55 dari target 30;



9. Persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong (persen) sebesar 84,50 dari target 75;
10. IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 81,84 dari target 73;
11. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai) sebesar 87,40 dari target 85,15;
12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) sebesar 79,55 dari target 72,5;
13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen) sebesar 90 dari target 72,5;
14. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 96,71 dari target 89.

Adapun indikator Kinerja yang tidak tercapai targetnya adalah :

1. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 69,75 dari target 75,07;
2. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebesar 83,72 dari target 86.